

## **Hakikat Pendidikan Tinggi Islam Negeri (STAIN, IAIN, UIN) dan Swasta dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Barat dan Islam**

**\*<sup>1</sup>Khubby Mulyono, <sup>2</sup>Nashrullah**

<sup>1,2</sup>Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik, Indonesia

email: \*<sup>1</sup>[khubby.mulyono@gmail.com](mailto:khubby.mulyono@gmail.com)

### **Abstract**

*The institutional transformation of Islamic Higher Education (Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam/PTKI) from State Institutes of Islamic Studies (STAIN) and State Islamic Institutes (IAIN) into State Islamic Universities (UIN) marks a fundamental shift in the epistemological landscape of Islamic education in Indonesia. This phenomenon generates a dialectical tension between the pragmatic demands of modernity faced by state PTKI and the preservation of turāth traditions that remain dominant in private Islamic higher education institutions (PTKIS). This article aims to examine the ontological and axiological essence of these institutions through a comparative analysis of Western and Islamic philosophies of education. Employing a qualitative method with a library research approach and philosophical analysis, the study finds the existence of an existential dualism within PTKI. The findings indicate that: (1) in terms of management and the structure of science curricula, UINs tend to adopt Western pragmatism oriented toward the market and managerial efficiency; (2) conversely, in terms of ethical substance and ultimate goals, PTKI continue to strive to maintain Islamic essentialism aimed at forming the Insān Kāmil; and (3) PTKIS play a crucial role as guardians of tradition, balancing the euphoria of scientism within UINs. The article concludes that the integration of knowledge (Wahdat al-'Ulūm) in UINs still faces challenges of latent secularization, thus requiring a renewed strengthening of adab-based curricula and synergy with the pesantren educational model.*

**Keywords:** *Epistemology, Philosophy of Education, Integration of Knowledge, Pragmatism, State Islamic Higher Education Institutions (PTKIN)*

### **Abstrak**

Transformasi kelembagaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dari STAIN dan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) menandai pergeseran fundamental dalam lanskap epistemologi pendidikan Islam di Indonesia. Fenomena ini memicu ketegangan dialektis antara tuntutan modernitas yang pragmatis pada PTKI Negeri dengan pelestarian tradisi turats yang dominan pada PTKI Swasta (PTKIS). Artikel ini bertujuan untuk membedah hakikat ontologis dan aksiologis institusi tersebut melalui analisis komparatif antara Filsafat Pendidikan Barat dan Islam. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan analisis filosofis, penelitian ini menemukan adanya dualisme eksistensial dalam tubuh PTKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Secara manajemen dan struktur kurikulum sains, UIN cenderung mengadopsi aliran Pragmatisme Barat yang berorientasi pasar (market-oriented) dan efisiensi manajerial; (2) Sebaliknya, secara substansi etika dan tujuan akhir (ultimate goal), PTKI tetap berupaya mempertahankan esensialisme Islam yang bertujuan membentuk Insan Kamil; dan (3) PTKIS memegang peran krusial sebagai penjaga tradisi (guardian of tradition) yang menyeimbangkan euforia saintisme di UIN. Artikel ini menyimpulkan bahwa integrasi ilmu (Wahdatul Ulum) di UIN masih menghadapi tantangan sekularisasi terselubung, sehingga memerlukan penguatan kembali kurikulum berbasis adab dan sinergi dengan model pendidikan pesantren.

**Kata Kunci:** *Epistemologi, Filsafat Pendidikan, Integrasi Ilmu, Pragmatisme, PTKIN*

## **PENDAHULUAN**

Sejarah Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia adalah sejarah panjang negosiasi yang rumit antara keteguhan "keimanan" dan tuntutan "kemajuan zaman". Dinamika ini bukan sekadar perubahan nama atau alih status administratif semata, melainkan sebuah pergulatan identitas yang melibatkan pergeseran paradigma keilmuan yang mendasar. Perubahan ini mencerminkan respons umat Islam Indonesia terhadap globalisasi dan modernitas, di mana institusi pendidikan dituntut untuk tidak hanya melahirkan ulama yang mumpuni dalam ilmu agama, tetapi juga cendekiawan yang mampu bersaing dalam kancah sains dan teknologi global.

Secara historis, evolusi kelembagaan ini dapat dipetakan dalam tiga fase krusial yang masing-masing membawa semangat zamannya sendiri. Pertama, fase spesialisasi yang direpresentasikan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Pada fase ini, ontologi keilmuan bersifat monodisiplin dan sangat kental dengan nuansa esensialis. STAIN didesain secara spesifik untuk mencetak tenaga ahli di bidang agama murni, seperti ahli fiqih, penyuluh agama, atau guru agama, yang sering disebut sebagai "ulama birokrat". Fokus kurikulumnya sangat terpusat pada transfer of religious knowledge tanpa banyak bersinggungan dengan disiplin sains modern secara mendalam. Dalam fase ini, dikotomi ilmu belum menjadi isu sentral karena batas demarkasi antara ilmu agama dan umum masih sangat tebal.

Kedua, fase institusionalisasi melalui Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Transformasi ini menandai penggabungan berbagai disiplin ilmu agama dalam satu payung institusi yang lebih besar. Meskipun mulai ada fakultas-fakultas yang beragam (Tarbiyah, Syariah, Ushuluddin, Dakwah), epistemologinya masih berada dalam koridor Islamic Studies yang ketat. Pendekatan yang digunakan masih dominan normatif-doktriner, menjaga kemurnian ajaran agama dari intervensi luar. IAIN pada masanya menjadi simbol keamanan studi Islam di Indonesia, namun kritik mulai bermunculan mengenai relevansi lulusannya di tengah pasar kerja yang semakin industrialis.

Ketiga, dan yang paling radikal, adalah fase integrasi universal melalui Universitas Islam Negeri (UIN). Perubahan ini membawa konsep "Mandat yang Diperluas" (Wider Mandate), sebuah jargon kebijakan yang melegitimasi UIN untuk membuka program studi umum seperti Kedokteran, Teknik, Psikologi, dan Sains Murni. Secara sosiologis, langkah ini adalah upaya UIN untuk mensejajarkan diri dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) umum seperti UI atau UGM demi merespons tantangan modernitas. Transformasi ini diharapkan mampu menghapus

dikotomi ilmu yang selama ini memisahkan "ilmu agama" (milik Tuhan) dan "ilmu umum" (milik manusia/sekuler).

Namun, di tengah arus besar perubahan negeri ini, ribuan PTKIS (Swasta) tetap eksis dengan dinamika yang berbeda. Mereka bertahan dengan tradisi berbasis pesantren dan pengkajian Kitab Kuning (Turats), berperan secara sosiologis sebagai penjaga gawang tradisi (*guardian of tradition*) di tengah euforia modernisasi yang melanda UIN. Keberadaan PTKIS seringkali dipandang sebelah mata dalam peta pendidikan nasional karena keterbatasan fasilitas, namun secara filosofis, mereka memegang kunci otentisitas keilmuan Islam yang mulai pudar di kampus-kampus negeri yang terobsesi dengan peringkat dunia.

Transformasi kelembagaan ini memunculkan kesenjangan akademik yang tajam dan problematis. Inti permasalahan terletak pada pertarungan dua paradigma besar yang seringkali bertabrakan di ruang akademik: hegemoni Pragmatisme Barat yang berorientasi pasar melawan upaya pelestarian nilai Turats atau tradisi Islam. Fakta empiris di lapangan menunjukkan ironi di mana banyak program studi umum di UIN justru lebih diminati oleh calon mahasiswa dibandingkan program studi agama murni (seperti Tafsir Hadis atau Aqidah Filsafat). Fenomena ini menimbulkan kecenderungan ilmu agama hanya menjadi "tempelan" atau sekadar mata kuliah umum (MKU) pelengkap, sementara fokus utama civitas akademika tersedot pada sains modern yang sekuler dan tuntutan akreditasi.

Meskipun jargon "Integrasi Ilmu" didengungkan sebagai filosofi pembeda UIN, dalam praktiknya sering terjadi dualisme epistemologis. Dosen agama mengajar dengan dalil wahyu yang normatif, sementara dosen sains mengajar dengan paradigma positivisme yang empiris, tanpa adanya dialog yang bermakna di antara keduanya. Penelitian terdahulu, seperti studi Amiruddin (2017), menegaskan bahwa konversi ini bertujuan menjadikan PTKI adaptif terhadap perubahan sosial. Namun, Azyumardi Azra (2002) telah lama mengingatkan adanya risiko pergeseran orientasi pendidikan dari pencarian kebenaran (*truth-seeking*) menuju pemenuhan selera pasar (*market-serving*). Peringatan ini semakin relevan hari ini ketika universitas lebih sibuk dengan indikator kinerja utama (IKU) berbasis ekonomi daripada kedalaman spiritual. Hal ini diperkuat oleh studi terbaru Ihsan et al. (2025) yang menunjukkan bahwa pendidikan Islam kontemporer masih menghadapi dikotomi epistemologis yang berimplikasi serius pada krisis identitas keilmuan.

Masih terdapat kesenjangan analisis dalam literatur yang ada, khususnya mengenai bagaimana konstruksi ontologis institusi ini jika dibedah secara head-to-head menggunakan pisau analisis Filsafat Barat dan Filsafat Islam secara komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mendudukan kembali hakikat (*nature*) Universitas Islam. Tujuannya adalah

merumuskan peta jalan sintesis antara Filsafat Barat yang menawarkan metodologi kemajuan (progress) dengan Filsafat Islam yang menawarkan landasan nilai (value). Secara spesifik, artikel ini menjawab bagaimana konstruksi ontologis PTKIN dan PTKIS, serta bagaimana analisis kritis filsafat pendidikan Barat (Pragmatisme & Perennialisme) dan Islam (Integrasi Ilmu) terhadap institusi tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mencegah sekularisasi terselubung melalui redefinisi filosofis hakikat universitas Islam.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Pilihan metodologis ini didasarkan pada karakteristik objek material penelitian yang bersifat abstrak dan teoretis, yakni berupa ide, gagasan konseptual, dan landasan filosofis, bukan fenomena lapangan yang membutuhkan pengukuran statistik kuantitatif. Dalam konteks ini, penulis memosisikan teks, dokumen kebijakan, dan wacana akademis sebagai subjek utama penelitian. Penggalan data tidak terbatas pada pembacaan tekstual semata, namun melibatkan pembacaan kontekstual untuk memahami "semangat zaman" yang melatarbelakangi lahirnya teks-teks tersebut.

Pendekatan yang digunakan adalah filosofis-komparatif. Pendekatan filosofis digunakan untuk melacak akar pemikiran (*radix*) yang meliputi aspek ontologis (hakikat keberadaan institusi), epistemologis (sumber dan struktur keilmuan), dan aksiologis (nilai dan tujuan pendidikan) dari PTKI. Analisis ontologis difokuskan pada pertanyaan "apa hakikat universitas Islam?", analisis epistemologis pada "bagaimana ilmu dikonstruksi?", dan analisis aksiologis pada "untuk apa ilmu itu diajarkan?". Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk menyandingkan (*juxtaposition*) dua paradigma besar yang saling berkontestasi: Filsafat Pendidikan Barat (khususnya Pragmatisme dan Perennialisme) dengan Filsafat Pendidikan Islam (khususnya konsep Integrasi Ilmu dan Islamisasi Pengetahuan). Tujuannya adalah mencari titik temu (*convergence*) dan titik pisah (*divergence*) di antara keduanya. Komparasi ini penting untuk melihat apakah transformasi UIN merupakan evolusi alamiah dari tradisi Islam atau justru infiltrasi hegemoni epistemologi Barat.

Data diklasifikasikan menjadi sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi dokumen institusional seperti Statuta UIN/IAIN dan Rencana Induk Pengembangan (RIP), serta karya filsuf otoritatif. Representasi pemikiran Barat diambil dari karya John Dewey (*Democracy and Education*) yang menjadi landasan pragmatisme pendidikan modern. Representasi pemikiran Islam diambil dari karya Syed Muhammad Naquib Al-Attas (*Islam and Secularism*), Ismail Raji Al-Faruqi (*Islamization of Knowledge*), serta karya tokoh integrasi PTKI seperti M. Amin

Abdullah (Islamic Studies di Perguruan Tinggi) dan Imam Suprayogo. Data sekunder berasal dari artikel jurnal terakreditasi dan laporan penelitian relevan.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk memetakan konsep kunci yang muncul dalam literatur, dan hermeneutika untuk menangkap makna di balik teks kebijakan (meaning behind the text) dengan mempertimbangkan konteks sosio-historis saat kebijakan transformasi tersebut dibuat. Hermeneutika memungkinkan peneliti untuk tidak terjebak pada makna literal statuta universitas, melainkan menyelami intensi filosofis para pendiri dan pengembang kebijakan pendidikan Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ontologi Kelembagaan: Antara *State-Owned* dan *Private***

Analisis ontologis menunjukkan adanya perbedaan mendasar dan signifikan antara STAIN/IAIN, UIN, dan PTKIS dalam memandang hakikat keberadaannya. Perbedaan ini bukan sekadar variasi administratif, melainkan cerminan dari perbedaan *worldview* (pandangan hidup) yang mendasari masing-masing institusi. STAIN dan IAIN secara ontologis dikonstruksi sebagai lembaga monodisiplin atau rumpun sejenis yang berafiliasi kuat dengan aliran Esensialisme. Dalam perspektif ini, institusi pendidikan dipandang sebagai penjaga nilai-nilai luhur yang bersifat tetap (immutable). Mereka memosisikan diri sebagai "Penjaga Gawang" ortodoksi agama dengan struktur keilmuan yang bersifat Normatif-Teologis. Kurikulum didesain untuk melestarikan status quo keagamaan dan memastikan transmisi pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa distorsi. Validitas kebenaran diukur berdasarkan dalil naqli (wahyu), dan tujuannya adalah transmisi sacred knowledge untuk menjaga akidah umat. Eksistensi STAIN/IAIN adalah manifestasi dari kewajiban negara untuk menjaga moralitas bangsa melalui pendidikan agama.

Transformasi menjadi UIN menandai pergeseran ontologis menuju multidisiplin dengan nuansa Progresivisme yang kental. Hakikat UIN didefinisikan ulang bukan lagi sekadar penjaga wahyu, melainkan sebagai "Laboratorium Peradaban". Ontologi UIN mencoba mendialogkan "teks" (Al-Qur'an) dengan "konteks" (realitas sains dan sosial). UIN menerima segala jenis ilmu, baik agama maupun sains, sebagai satu kesatuan ontologis. Perubahan ini mengisyaratkan bahwa Islam tidak boleh hanya berbicara tentang hukum fiqih di menara gading, tetapi harus turun ke bumi menyelesaikan masalah kemiskinan, kesehatan, dan teknologi. Namun, pergeseran ini membawa risiko ontologis berupa pendangkalan identitas keislaman, di mana label "Islam" berpotensi hanya menjadi atribut formalitas di tengah dominasi struktur keilmuan umum.

Di sisi lain, PTKIS memiliki ontologi unik sebagai Community Based Education yang lahir dari rahim masyarakat sipil (civil society), seperti organisasi

masyarakat (NU, Muhammadiyah) atau yayasan pesantren. Ketika UIN bergerak ke arah universalitas sains dan mengejar status World Class University, PTKIS hadir mengisi ruang kosong yang ditinggalkan negara, yakni pelestarian tradisi lokal (local wisdom) dan kajian Turats. Secara ontologis, PTKIS berfungsi sebagai "Benteng Kultural" atau "Pesantren Tingkat Tinggi" yang menjaga keberlangsungan sanad keilmuan tradisional. Mereka tidak terbebani oleh birokrasi negara yang kaku, sehingga memiliki fleksibilitas dalam mempertahankan kurikulum kitab kuning yang mendalam, meskipun seringkali tertinggal dalam aspek manajerial modern.

### **Perspektif Filsafat Pendidikan Barat: Utilitarianisme dan Saintisme:**

Jika dibedah menggunakan pisau analisis filsafat Barat, transformasi UIN menunjukkan adopsi nilai-nilai Pragmatisme, Utilitarianisme, dan Saintisme yang masif. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari upaya modernisasi dan standardisasi internasional.

Transformasi UIN mencerminkan adopsi nilai Pragmatisme John Dewey, di mana kebenaran suatu lembaga diukur dari tingkat kegunaan praktisnya (utility) bagi kehidupan. Dalam pandangan Dewey, pendidikan tidak boleh terpisah dari kehidupan sosial dan ekonomi. Pembukaan program studi umum seperti Kedokteran, Teknik, dan Ekonomi Bisnis dilihat sebagai respons pragmatis terhadap logika pasar (market logic). Masyarakat membutuhkan tenaga profesional, dan UIN merespons demand tersebut. Akibatnya, pendidikan berubah fungsi menjadi instrumen mobilitas ekonomi. Mahasiswa memilih UIN bukan lagi semata untuk tafaqquh fi al-din (memperdalam agama), melainkan untuk mendapatkan ijazah yang laku di pasar kerja. Kritik pragmatisme di sini sangat tajam: UIN berisiko terjebak menjadi "pabrik pekerja bertoga" yang materialistis, di mana nilai-nilai keislaman tergerus oleh orientasi kerja.

Tantangan ontologis terbesar adalah masuknya hegemoni sains bebas nilai (value-free) yang berakar dari positivisme Barat. Positivisme memisahkan fakta dari nilai, dan menganggap bahwa hanya hal-hal yang dapat dibuktikan secara empiris yang bernilai ilmiah. Ketika UIN mendirikan fakultas sains, mereka seringkali mengimpor metodologi Barat mentah-mentah. Metode di laboratorium UIN sama persis dengan universitas sekuler—berbasis empirisme dan rasionalisme yang menafikan metafisika. Hal ini menciptakan ko-eksistensi tanpa dialog: sains berjalan dengan logika sekulernya sendiri, sementara agama terisolasi di pojok kampus.

Kondisi ini diperparah dengan masuknya konsep Total Quality Management (TQM) ke dalam tata kelola PTKI. Kualitas pendidikan diukur melalui kuantifikasi administratif (borang akreditasi, peringkat Webometrics). Semua hal dikonversi menjadi angka dan data statistik. Hal ini berisiko mengorbankan karakteristik unik

pesantren dan pendidikan Islam yang bersifat kualitatif, personal, dan esoteris (berkah), yang tidak bisa diukur oleh angka-angka statistik. Hubungan kiai-santri yang sakral berubah menjadi hubungan penyedia jasa-konsumen yang transaksional.

### **Perspektif Filsafat Pendidikan Islam: Menuju Wahdatul Ulum**

Sebagai antitesis terhadap hegemoni Barat, Filsafat Pendidikan Islam menawarkan landasan ontologis yang berpusat pada Tauhid dan integrasi. Ini adalah upaya defensif sekaligus konstruktif untuk menjaga identitas keislaman institusi.

Filsafat Pendidikan Islam menolak dikotomi ilmu melalui konsep Wahdatul Ulum (Kesatuan Ilmu). Karena seluruh alam semesta adalah ciptaan Allah, maka mempelajari sains (ayat kauniyah) sama sakralnya dengan mempelajari Al-Qur'an (ayat qauliyah). Berbagai model integrasi dikembangkan, seperti "Jaring Laba-laba" (Spider Web) oleh M. Amin Abdullah atau "Pohon Ilmu" oleh Imam Suprayogo. Secara filosofis, model ini mencoba mendialektikkan tiga nalar: Nalar Bayani (teks), Nalar Burhani (rasional/empiris), dan Nalar Irfani (intuitif/spiritual). Integrasi ini bertujuan agar lulusan UIN tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki ketajaman spiritual.

Mengacu pada pemikiran Al-Attas dan Al-Faruqi, PTKI memiliki beban moral untuk melakukan Islamisasi Ilmu Pengetahuan. Al-Attas menegaskan bahwa sains Barat tidak bebas nilai; ia membawa pandangan hidup (worldview) sekuler yang memisahkan manusia dari Tuhan. Oleh karena itu, kurikulum UIN harus mampu merekonstruksi sains agar selaras dengan Tauhid. Proses ini bukan sekadar memberi label "Islami" pada ilmu umum, melainkan merombak landasan epistemologisnya. Tujuan akhir pendidikan bukanlah mencetak teknokrat semata, melainkan penanaman Adab untuk membentuk "Manusia yang Baik" (The Good Man atau Insan Kamil). Manusia yang beradab adalah mereka yang mampu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang wajar sesuai tatanan penciptaan Tuhan.

Dalam ekosistem ini, PTKIS mengambil peran filosofis krusial sebagai benteng terakhir (the last bastion) bagi pelestarian Ilmu Alat (Nahwu, Sharaf) dan Fiqh Klasik secara mendalam (Tafaqquh fi al-Din). Materi-materi ini seringkali tergerus dalam kurikulum UIN yang padat dengan muatan umum dan praktikum sains. Jika UIN memperluas wawasan keilmuan secara horizontal (melebar ke sains), maka PTKIS berfungsi memperdalam akar keilmuan secara vertikal (menghunjam ke tradisi). Tanpa PTKIS, lanskap pendidikan Islam Indonesia akan kehilangan pijakan tradisinya dan hanyut dalam arus modernisme yang dangkal.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini mengonfirmasi adanya dualisme eksistensial yang mendalam dan belum terselesaikan dalam tubuh PTKI pasca-transformasi. Interpretasi utama dari temuan ini adalah bahwa perubahan status dari STAIN/IAIN menjadi UIN bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah pergeseran ontologis yang menciptakan ketegangan identitas yang serius. UIN seolah memiliki "dua jiwa" dalam satu tubuh. Di satu sisi, UIN secara agresif mengadopsi struktur kurikulum, standar manajemen, dan budaya akademik yang berafiliasi dengan pragmatisme Barat. Hal ini dilakukan demi merespons tuntutan pasar (market logic) dan kompetisi global. Di sisi lain, secara aksiologis, institusi ini tetap berupaya mempertahankan visi esensialisme Islam untuk membentuk Insan Kamil.

Dua kutub ini seringkali menarik ke arah yang berlawanan. Hal ini mengindikasikan bahwa identitas PTKI saat ini adalah sebuah hibriditas; ia berada di persimpangan jalan (crossroads) antara metode Barat yang rasional-empiris dan visi Islam yang wahyu-sentris<sup>89</sup>. Hibriditas ini bisa menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik (sintesis), namun bisa menjadi kehancuran jika dibiarkan berjalan sendiri-sendiri (split personality). Selain itu, temuan ini mempertegas posisi PTKIS. Seringkali dianggap sebagai "kelas dua" dibanding UIN, PTKIS justru memiliki peran filosofis vital sebagai defensor fidei atau penjaga tradisi. Mereka menyeimbangkan euforia saintisme di UIN dengan tetap menjaga pelita ilmu-ilmu klasik tetap menyala.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat kritik terhadap implementasi konsep integrasi ilmu (Wahdatul Ulum). Penelitian ini menunjukkan adanya gejala "Pseudo-Integrasi" atau integrasi semu. Pertemuan antara sains dan agama di UIN seringkali berhenti pada tataran simbolik dan struktural. Contohnya, mahasiswa kedokteran hanya diberikan tempelan ayat Al-Qur'an di awal kuliah, namun materi anatomi tetap diajarkan dengan perspektif materialisme murni. Ayat suci hanya menjadi justifikasi teologis, bukan landasan epistemologis. Ini belum menyentuh rekonstruksi epistemologis yang mendasar. Hal ini berimplikasi pada praktik pendidikan di lapangan, di mana sains masih diajarkan dengan epistemologi positivistik yang meminggirkan dimensi metafisik. Dampak jangka panjangnya adalah potensi lahirnya sarjana yang teknokrat namun kering spiritualitas (split personality). Mereka mungkin ahli dalam rekayasa genetika, namun gagap dalam memahami etika bioetika Islam. Temuan ini sejalan dengan peringatan Azra (2002) mengenai risiko pergeseran orientasi dari truth-seeking ke market-serving, serta memperkuat argumen Al-Attas (1993) tentang bahaya sekularisasi jika ilmu tidak mengalami proses Islamisasi yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2006). *Islamic studies di perguruan tinggi: Pendekatan integratif-interkonektif*. Pustaka Pelajar.
- Abdullah, M. A. (2014). Religion, science, and culture: An integrated, interconnected paradigm of science. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 52(1), 175-203. <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.521.175-203>
- Al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and secularism*. ISTAC.
- Al-Faruqi, I. R. (1982). *Islamization of knowledge: General principles and work plan*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Amiruddin, H. (2017). Dinamika lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41(1), 95-114.
- Azra, A. (2002). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Kencana Prenada Media Group.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and education: An introduction to the philosophy of education*. Macmillan.
- Fariqoini, A. (2025). Pendidikan Islam dan Islamisasi ilmu pengetahuan. *Tadris: Jurnal Tarbiyah*, 19(1), 31-40.
- Hadi, S. (2019). Transformasi PTKIN dan tantangan integrasi keilmuan: Studi kritis di UIN Sunan Kalijaga dan UIN Maulana Malik Ibrahim. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 231-254.
- Ihsan, P., Rusydi, A. M., Saputra, R., & Wahyuni, S. (2025). Epistemologi pendidikan Islam dalam perspektif klasik dan modern. *Ensiklopedia: Journal of Islamic Studies*, 7(4), 135-146.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Statistik pendidikan tinggi keagamaan Islam tahun 2018-2019*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Lubis, N. A. F. (2015). *Rekonstruksi pendidikan tinggi Islam: Memberdayakan UIN menuju universitas riset*. Citapustaka Media.
- Madjid, N. (1997). *Bilik-bilik pesantren: Sebuah potret perjalanan*. Paramadina.
- Nata, A. (2008). *Manajemen pendidikan: Mengatasi kelemahan pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Nursalim, E., & Khojir. (2021). Aliran perenialisme dan implementasinya dalam pendidikan Islam. *Cross-Border: Jurnal Kajian Keislaman Lintas Negara*, 4(2), 673-684.
- Salman, A. M. (2017). Revitalisasi pesantren sebagai agen pengembangan sumber daya mahasiswa PTKIN. *Maharot: Journal of Islamic Education*, 1(1), 1-21.
- Suprayogo, I. (2005). *Paradigma pengembangan keilmuan di perguruan tinggi: Membangun kembali universitas Islam*. UIN Malang Press.
- Suyatno. (2013). *Integrasi ilmu di UIN: Sebuah refleksi filosofis*. Cendekia: Jurnal

Kependidikan dan Kemasyarakatan, 11(1), 50-68.

Zada, K. (2017). Islam and Science in Contemporary Indonesia: The Case of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. *Studia Islamika*, 24(3), 515-545.